

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN MODERASI AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN

Dewa Made Adi Kesuma Yudha¹
Made Gede Wirakusuma²
Ni Ketut Rasmini³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
Email: dewayudha1988@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi dan kemampuan akuntabilitas pelaporan keuangan dalam memoderasi desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2007 sampai dengan 2013. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan *Moderated Regression Analysis*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dan akuntabilitas pelaporan keuangan tidak memoderasi pengaruh desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: *desentralisasi fiskal, akuntabilitas, pertumbuhan ekonomi*

ABSTRACT

This research aims to obtain empirical evidence of the effect of fiscal decentralization on economic growth and the ability of financial reporting accountability in moderating fiscal decentralization on economic growth. The test of research hypothesis is using Moderated Regression Analysis. Data source being used is secondary data from regencies/cities in Province of Bali in the year 2007 up to 2013. The result of hypothesis test shows that the degree of fiscal decentralization has positive impact on economic growth and financial reporting accountability does not moderate the effect of fiscal decentralization on economic growth.

Keywords: *fiscal decentralization, accountability, economic growth*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan di daerah merupakan suatu bagian integral dari pembangunan nasional. Tujuan dilakukannya pembangunan daerah adalah untuk penyebarluasan serta pemerataan pembangunan di daerah dalam membuat keseimbangan dan keserasian atau memperkecil tingkat perbedaan laju pertumbuhan antar daerah, serta membuat padu seluruh kegiatan pembangunan di daerah dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan (Sibero; 1985). Pembangunan ekonomi suatu daerah (*region*) erat kaitannya dengan karakteristik dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah serta adanya keterkaitan (*linkage*) kegiatan ekonomi antar daerah sekitarnya. Antara satu daerah dengan daerah lainnya pada umumnya memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda-beda. (Glasson: 1977).

Pertumbuhan ekonomi menjadi penting artinya sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah atas penerapan desentralisasi fiskal, untuk mengetahui kemajuan suatu daerah dapat dilihat pada angka pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi juga sebagai cerminan atas peningkatan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup. Pada 1 Januari 2001 zaman baru desentralisasi fiskal dan otonomi mulai efektif dilaksanakan di Indonesia. *Dalam pelaksanaannya juga diliputi oleh penyempurnaan-penyempurnaan pada kedua UU yang sebelumnya telah ada.* Pada Tahun 2004 UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah digantikan dengan UU tentang otonomi daerah yang baru,

yakni UU no. 32 tahun 2004 serta UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PKPD) digantikan dengan UU no. 33 tahun 2004. Dengan diterapkannya desentralisasi fiskal pemerintah daerah akan dapat melaksanakan dan membiayai sendiri pembangunan di daerahnya masing-masing agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang semakin baik kedepannya. Masing-masing daerah diharapkan dapat melaksanakan pembangunan daerah dalam bidang ekonomi secara mandiri dari sisi perencanaan, pembangunan serta pembiayaan supaya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik dapat terwujud.

Gagasan tentang desentralisasi secara prinsipil adalah suatu antithesis dari politik sentralistis. Desentralisasi memberikan gagasan mengenai kekuasaan politik serta kewenangan administrasi yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, sebaliknya pada struktur politik sentralistis, pemerintah pusat untuk kekuasaan politiknya cenderung melakukan unifikasi (Hidayat, 2005). Selanjutnya, Kuncoro (2004) berpendapat bahwa desentralisasi mulai diperhatikan karena terdapat suatu bentuk kesadaran bahwa pembangunan merupakan hal yang kompleks serta dipenuhi dengan ketidakpastian dan susah direncanakan dan dikendalikan dari pusat, selain dihubungkan dengan perencanaan terpusat yang tidak berhasil dan strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equality*) yang populer. Karena hal tersebut para pelopor desentralisasi dengan penuh keyakinan beragumen dan mengajukan sederet panjang alasan mengenai desentralisasi yang penting dilaksanakan di negara dunia ketiga dalam administrasi dan perencanaan. Perhatian pada desentralisasi fiskal juga muncul

pada negara-negara OECD dan menjadi agenda utama yang tidak hanya terbatas pada berbagai negara berkembang sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi (Vazquez and McNab, 2001). Dengan diterapkannya desentralisasi fiskal pertumbuhan ekonomi meningkat dan dalam sektor publik pendapatan dan efisiensi meningkat serta memotong defisit anggaran (Bahl, Linn, 1992; Bird, 1993; dan Bird, Wallich, 1993).

Penelitian mengenai desentralisasi fiskal pada hasil dan kesimpulannya sering kali antara para peminat desentralisasi dan peneliti. Adanya perbedaan hasil penelitian desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemungkinan adanya faktor lain dalam hubungan pertumbuhan ekonomi dengan desentralisasi fiskal tersebut. Pada penelitian yang akan dilakukan ini, akan ditambahkan variabel akuntabilitas pelaporan keuangan sebagai variabel pemoderasi. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang selanjutnya dibarengi oleh Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengharuskan pemerintah daerah dan pusat untuk membuat laporan keuangan yang nantinya diperiksa secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut adalah langkah dalam menciptakan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel.

Mekanisme *good public governance* juga semestinya mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal khususnya dalam hal pemerintahan atau tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. *Good governance* dalam bidang pemerintahan penerapannya mempunyai beberapa tujuan

diantaranyameningkatkan kinerja publik, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pada pemerintahan (Kapucu, 2009). Terciptanya suatu pemerintah daerah yang akuntabel menjadi suatu harapan tersendiri bagi masyarakat, sehingga tercipta suatu sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerah. Otonomi daerah dalam hal pelaksanaannya yang dibarengi oleh perpindahan wewenang dan kekuasaan beberapa urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dalam pengelolaannya mewajibkan untuk mereformasi tata kelola pemerintah untuk berbagai aspek termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan daerah (Carnegie, 2005). Pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelaporan keuangannya dituntut agar akuntabilitasnya lebih ditingkatkan. Penelitian Huther dan Shah (1998) di 80 negara mendapatkan hasil bahwa desentralisasi mempunyai suatu korelasi yang positif dengan kualitas pemerintahan (Mardiasmo, 2009). Bagi masyarakat, terwujudnya suatu pemerintah daerah yang akuntabel merupakan suatu harapan tersendiri, sehingga dapat tercipta suatu sistem pada pemerintah daerah dalam hal pertanggungjawabannya sebagai suatu entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas pemakaian kekayaan daerah. Menurut Mardiasmo (2009) pada sektor publik akuntabilitas memiliki pengertian bahwa pada pemerintah daerah dalam tata kelolanya terdapat suatu hubungan keagenan (teori keagenan) antara pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*.

Teori keagenan dalam organisasi publik menurut Lane (2000) juga bisa diterapkan. Dari konsep teori keagenan inilah asimetri informasi dapat terjadi antara pihak yang mempunyai akses langsung pada informasi yaitu pemerintah sebagai

agent dengan pihak masyarakat sebagai *principal*. Karena jika terjadi asimetri informasi bisa menjadi penyebab adanya tindakan korupsi atau penyelewengan oleh pemerintah sebagai *agent*. Agar korupsi dapat terhindar di pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dalam pengelolaannya harus akuntabel serta diperlukan kehandalan sistem pengawasan. Dengan terwujudnya suatu pemerintah daerah yang akuntabel berarti masalah asimetri informasi yang terjadi semakin kecil, sehingga kesempatan penyelewengan atau korupsi yang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah daerah sebagai *agent* semakin sedikit.

Keuangan pemerintah daerah pada tingkat akuntabilitasnya yang dapat digambarkan oleh LKPD menjadi suatu keperluan yang penting untuk pelaksanaan otonomi daerah, sehingga agar tahu mengenai akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting bagi BPK RI untuk selalu melakukan audit atas LKPD (Heriningsih dan Marita, 2013). Laporan hasil audit oleh BPK RI dapat berupa opini auditor, diantaranya terdapat lima jenis pendapat auditor (BPK). Apabila opini auditor *unqualified opinion* dan *unqualified opinion with modified wording* maka menunjukkan akuntabilitas suatu pemerintah daerah yang semakin baik dan pelaksanaan korupsi diharapkan dapat berkurang. Sedangkan jika opini *qualified opinion*, *adverse opinion*, dan *disclaimer opinion*, maka kemungkinan masih terjadi salah saji yang bersifat material dimanahal tersebut bisa juga mengindikasikan terjadinya korupsi yang masih bias. Dari penjelasan tersebut di atas dapat diartikan bahwa jika desentralisasi fiskal yang didukung dengan pelaporan keuangan suatu daerah yang akuntabel maka aliran dana untuk pembangunan daerah tersebut sudah teralokasi dengan benar yang akan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut, tetapi jika pelaporan keuangan daerah tersebut tidak akuntabel maka aliran dana untuk pembangunan daerah tersebut tidak teralokasi dengan benar yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut.

Kajian Pustaka

Teori utama penelitian ini menggunakan Teori Kontinjensi didukung dengan Teori Pertumbuhan Ekonomi, Desentralisasi Fiskal, dan Akuntabilitas. Bila mendasarkannya dengan pendekatan kontinjensi maka ada dugaan bahwa kemungkinan terjadinya saling interaksi faktor situasional lainnya dalam pengaruhnya pada situasi tertentu. Teori kontinjensi mempunyai hakikat bahwa tidak satupun terdapat cara yang paling baik yang dapat dipakai dalam semua situasi (keadaan) lingkungan.

1. Teori Kontinjensi

Pendekatan kontinjensi yang para peneliti pakai untuk penelitian seperti ini adalah dalam rangka memberikan masukan berbagai faktor yang seharusnya dipertimbangkan dalam merencanakan suatu penelitian. Govindarajan (1986) dalam Sukardi (2002) berpendapat bahwa agar berbagai perbedaan hasil penelitian dapat terselesaikan, hal tersebut bisa dilakukan dengan memakai pendekatan kontinjensi (*contingency approach*). Penelitian dalam akuntansi ada beberapa memakai pendekatan kontinjensi, pendekatan ini digunakan untuk melihat hubungan berbagai variabel kontekstual seperti ketidakpastian lingkungan (Otley, 1980). Pada akuntansi pendekatan kontinjensi didasarkan pada premis bahwa tidak ada secara universal untuk sistem akuntansi tepat selalu untuk bisa dilakukan pada

organisasi-organisasi untuk berbagai kondisi, tetapi dipengaruhi juga oleh berbagai faktor situasional yang terdapat di dalam suatu organisasi (Hanu, 2006). Pada akuntansi pengadopsian teori kontinjensi timbul sebagai suatu kebutuhan pada hasil riset empiris untuk interpretasinya (Hanu, 2006). Menurut Teori Kontinjensi sebuah organisasi dalam beroperasi memiliki tujuan akhir ialah supaya dapat bertahan (*survive*) dan dapat tumbuh (*growth*) atau boleh juga disebut keberlangsungan (*viability*). Adapun penekanan yang diberi oleh teori kontinjensi adalah pada perlunya memfokuskan pada perubahan dengan asumsi tidak terdapat satupun hukum atau aturan yang memberi solusi paling baik pada setiap tempat, waktu, semua orang ataupun pada semua situasi.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pada terjadinya kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil (Cahyono dan Darwanto, 2002). Jadi perekonomian bias dibilang tumbuh atau berkembang bila pertumbuhan output produksi riil dapat terjadi. Pertumbuhan ekonomi, adalah salah satu indikator penting yang bias dipakai dalam menilai pembangunan suatu daerah dalam peningkatan kemajuannya. Teori ekonomi klasik bahkan mengisyaratkan bahwa indikator ini adalah indikator yang terpenting dalam menilai tingkat kesuksesan pembangunan pada suatu daerah. Masing-masing daerah memiliki corak pertumbuhan ekonomi yang masing-masing berbeda. Perencanaan pembangunan ekonomi pada suatu daerah dapat dimulai dari perlunya kenal dengan sosial, fisik, dan karakter ekonomi untuk daerah itu sendiri, termasuk dalam interaksi dengan daerah yang lain sehingga tidak terdapat strategi

pembangunan ekonomi daerah yang bisa berlaku pada semua daerah. pembangunan ekonomi daerah dalam penyusunan strateginya, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang, pemahaman tentang teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian pada berbagai pola pertumbuhan ekonomi dari wilayah-wilayah, adalah satu faktor yang cukup dalam menentukan kualitas pembangunan ekonomi daerah dalam perencanaannya (Cahyono dan Darwanto, 2002).

3. Desentralisasi Fiskal

Ternyata terminologi desentralisasi tidak hanya mempunyai satu makna. Desentralisasi bisa diterjemahkan ke dalam sejumlah arti, hal ini tergantung dari konteks pemakaiannya. Parson dalam Hidayat (2005) mendefinisikan desentralisasi sebagai pembagian kekuasaan pemerintah antara kelompok yang memegang kekuasaan di pusat dengan berbagai kelompok yang lainnya, dimana kelompok masing-masingnya tersebut mempunyai otoritas dalam mengatur berbagai bidang tertentu dalam lingkup teritorial suatu negara. Sedangkan Mawhood (1987) dengan tegas berpendapat bahwa desentralisasi ialah kekuasaan yang diserahkan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Sementara itu, definisi desentralisasi yang dirumuskan oleh Smith juga mengatakan sebagai kekuasaan yang diserahkan dari level (organisasi) yang lebih atas ke tingkatan yang lebih rendah, dalam suatu hierarki teritorial, yang bisa saja berlaku untuk organisasi pemerintah di dalam suatu negara, maupun pada berbagai organisasi besar yang lain (organisasi non pemerintah) (Hidayat, 2005).

Kebijakan desentralisasi secara garis besarnya dapat dibedakan atas 3 jenis (Litvack, 1999), antara lain:

- 1) Desentralisasi politik adalah kewenangan yang lebih besar dilimpahkan kepada daerah yang menyangkut aspek-aspek dalam mengambil suatu keputusan, termasuk pada berbagai peraturan dan penetapan standar.
- 2) Desentralisasi administrasi adalah kewenangan yang dilimpahkan, tanggung jawab, dan sumber daya antar tingkat-tingkat pemerintahan.
- 3) Desentralisasi fiskal adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menggali berbagai sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer yang lebih tinggi dari pemerintahan, dan menentukan investasi maupun belanja rutin.

Ketiga macam desentralisasi ini mempunyai hubungan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya dan merupakan prasyarat dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan desentralisasi, yaitu untuk kesejahteraan rakyat agar dapat terwujud.

Desentralisasi politik menurut Mardiasmo (2009) adalah ujung tombak pada terciptanya demokratisasi dan partisipasi rakyat yang semakin meningkat dalam tatanan pemerintahan. Sementara itu, desentralisasi administrasi adalah alat dalam melaksanakan suatu pelayanan kepada masyarakat, dan desentralisasi fiskal mempunyai fungsi untuk menciptakan pelaksanaan desentralisasi administratif dan politik dengan memberikan kewenangan pada bidang keuangan.

Desentralisasi fiskal secara konseptual bias juga dijelaskan sebagai suatu mekanisme penyaluran anggaran dari level pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah dalam rangka mendukung pelimpahan tugas atau fungsi pemerintahan (Khusaini, 2006). Konsep desentralisasi fiskal dalam pelaksanaannya, selama ini dikenal sebagai *money follow function* yang memberi

syarat bahwa tugas dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) akan diikuti oleh kewenangan yang dibagikan kepada daerah dalam hal pendanaan/penerimaan (*revenue assignment*). Dengan kata lain, wewenang pemerintah yang diserahkan dan dilimpahkan serta merta membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan agar kewenangan tersebut dapat terlaksana. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diatur sedemikian rupa sehingga kebutuhan untuk pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari berbagai sumber penerimaan yang ada (Rahmawati, 2008). Proses tersebut bias dilaksanakan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu penerimaan antar tingkatan pemerintahan yang dibagi agar bisa membuat berbagai fungsi pemerintahan dapat berjalan dalam kerangka desentralisasi.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas muncul dikarenakan adanya amanah kekuasaan yang diberikan pada orang atau pihak tertentu dalam melaksanakan tugasnya untuk pencapaian suatu tujuan tertentu dengan memakai alat pendukung yang ada. Dari penjelasan tersebut tersirat bahwa pihak penerima amanah mesti memberikan informasi tentang implementasi dari amanah tersebut yang telah dipercayakan padanya dengan pengungkapan segala sesuatu yang dilihat, dirasakan, dan dilaksanakan baik itu yang mencerminkan kegagalan maupun kesuksesan. Dapat juga dikatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dalam penyajian dan pelaporan segala kegiatan serta tindak tanduk yang dilaksanakan yang sesuai dengan mandat/amanah yang diembankan untuk pihak

pada level yang lebih tinggi/atasannya. Hal yang dipertanggungjawabkan ialah kinerja (kegagalan dan kesuksesan) yang dicapai oleh organisasi (Mansfield, 1982 and Kearns, 1996).

Hasil Penelitian Sebelumnya dan Hipotesis

Desentralisasi fiskal adalah kesempatan untuk pemerintah daerah dalam membiayai sendiri serta melaksanakan kemajuan pembangunan untuk daerahnya masing-masing dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Oates (1972) dalam Wibowo (2008) memberi penegasan bahwa peningkatan dari kemajuan ekonomi adalah *outcome* dari sesuainya preferensi pemerintah daerah dengan masyarakatnya yang terwujud karena semakin pentingnya peran dari pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Besar kemungkinan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dalam hal ini disebabkan karena adanya desentralisasi fiskal yang membuat suatu peluang pada pemerintah daerah untuk mendapatkan pendanaan yang pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Liu (2007) menemukan kualitas dalam pelayanan publik meningkat karena desentralisasi fiskal selain itu, *public goods* yang disediakan dimana spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga dihasilkan oleh desentralisasi fiskal. Fiskal yang didelegasikan kepada pemerintah yang keberadaannya di level bawah secara teori, diramalkan dapat memberi peningkatan pada ekonomi, dengan mengingat pemerintah daerah memiliki hubungan yang dekat dengan masyarakat pada daerahnya tersebut serta mempunyai suatu informasi yang lebih unggul dibandingkan dengan pemerintah pusat mengenai daerahnya masing-masing, sehingga pelayanan publik

yang memang betul dibutuhkan dapat diberikan. Semakin tinggi nilai derajat desentralisasi pada suatu negara, maka orientasi pemerintah, pembangunan sosial, manajemen ekonomi (makro), dan partisipasi masyarakatnya akan semakin baik (Mardiasmo, 2009).

Desentralisasi fiskal menurut Elmi (2005) adalah kewenangan yang dilimpahkan sebelumnya pada bidang penerimaan keuangan yang terpusat baik itu secara pemanfaatan ataupun administrasinya. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal salah satunya adalah mekanisme transfer dana dari APBN agar ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dapat terwujud serta dapat memberi stimulus pada aktifitas masyarakat dalam perekonomiannya. Dengan penerapan kebijakan desentralisasi fiskal pada nantinya besar harapan kemampuan keuangan antar daerah yang merata dapat tercipta yang sesuai pada besarnya penyerahan kewenangan urusan pemerintahan pusat kepada daerah otonom. Dengan mendasarkan dari uraian tersebut di atas, maka dapat diajukan hipotesis:

H₁: Desentralisasi fiskal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi

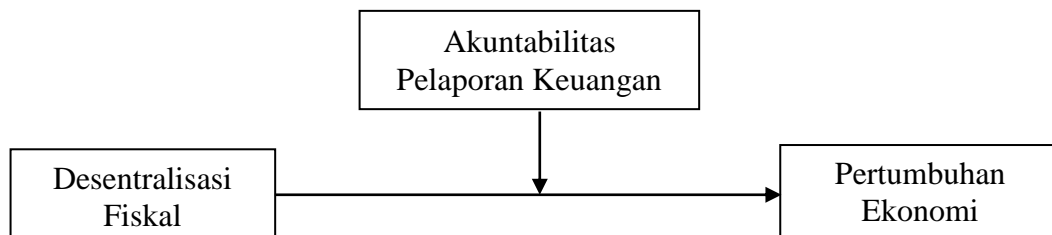
Penelitian-penelitian dalam menguji pengaruh desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi yang pernah dilakukan, mendapatkan hasil kesimpulan yang berbeda-beda. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Davoodi *and* Zou (1998), Zhang *and* Zou (1998), dan Xie, Zou, *and* Davoodi (1999) mendapatkan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak untuk hasil penelitian yang dilakukan oleh Akai *and* Sakata (2007), Desai, Freinkman, *and* Goldbrg (2003), dan Thiessen (2003) mendapatkan hasil bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh positif pada pertumbuhan

ekonomi. Di lain pihak hasil penelitian Baskaran *and* Feld (2009) dan Woller *and* Phillips (1998), gagal dalam memperoleh pengaruh desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi. Adapun untuk penelitian-penelitian yang dilaksanakan di Indonesia dalam hal mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi, berbeda-beda pula untuk hasil kesimpulannya. Penelitian Swasono (2007) mendapatkan hasil dimana desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak penelitiannya Wibowo (2008) mendapatkan hasil dimana desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Breuss *and* Eller (2004) membuat pernyataan bahwa pada antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi dalam hubungannya terdapat efek *ambivalen*, sehingga dalam menyimpulkan rekomendasi yang jelas tentang optimalnya desentralisasi sulit untuk dilakukan.

Faktor akuntabilitas pelaporan keuangan diduga memperkuat dan memperlambat pengaruh desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi. Bila dikaitkan dengan birokrasi, akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban pada pemberian otoritas pada pimpinan dalam pelaksanaan kebijakan. Akuntabilitas adalah kewajiban dalam menerangkan tentang penerapan dari otoritas itu dan menitikberatkan pada efektivitas serta efisiensi menggunakan dana, sumber daya manusia, harta kekayaan, dan berbagai sumber daya lainnya. Selain itu, akuntabilitas juga menitikberatkan pada peranan manajer atau pengawas. Pada dasarnya akuntabilitas memberikan suatu perhatian pada tercapainya hasil organisasi. (Salleh dan Iqbal, 1995).

Akuntabilitas dalam pemahamannya akan menimbulkan kesadaran bahwa implementasi akuntabilitas dapat memberi kemampuan yang lebih besar untuk lebih kompetitif bagi organisasi kedepannya dengan pencapaian kinerja secara optimal (Epstein *and* Birchard, 1999). Mohammad, Rasul, dan Umar (2004) menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan elemen penting dalam *good governance*. Pada dasarnya pemerintah daerah diberikan otonomi agar efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah dapat ditingkatkan untuk tercapainya *good governance*. (Mardiasmo, 2009). Dengan mendasarkan dari uraian tersebut di atas, maka dapat diajukan hipotesis:

H₂: Akuntabilitas pelaporan keuangan memperkuat pengaruh desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi



Gambar 1. Konsep Penelitian

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan Provinsi Bali pada seluruh kabupaten dan kotanya, yang berjumlah 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Badung,

Gianyar, Tabanan, Buleleng, Klungkung, Bangli, Karangasem, Jembrana dan Kota Madya Denpasar pada kurun waktu 2007-2013. Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2015.

Sumber Data

Untuk mendukung penelitian ini menurut sumbernya data yang dipakai adalah data sekunder, antara lain: Data APBD kabupaten/kota se-Bali yang diperoleh dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, data PDRB atas dasar harga konstan yang didapat dari (BPS) Provinsi Bali, dan opini yang diberikan BPK RI untuk kabupaten/kota se-Bali yang diperoleh pada Pusat Informasi dan Komunikasi BPK RI.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini memakai populasi seluruh APBD beserta opini yang dikeluarkan BPK pada LKPD kabupaten/kota se-Bali yang berjumlah 9 (sembilan) kabupaten/kota untuk kurun waktu 2007-2012 dan PDRB kabupaten/kota se-Bali yang berjumlah 9 (sembilan) kabupaten/kota untuk kurun waktu 2008-2013, jadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 9 (sembilan) kabupaten/kota dikalikan dengan 6 (enam) tahun amatan yang berjumlah 54 amatan. Metode pengambilan sampel yang dipakai merupakan sampel jenuh (sensus) dimana seluruh populasi akan dijadikan sampel.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai ialah metode statistik analisis regresi moderasi. Sebelum data dianalisis, awalnya dilakukan dulu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, serta uji autokolinearitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 1 variabel pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan rasio pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Nilai rata-rata (*mean*) variabel pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah 0,0589 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2008 sampai dengan 2013 rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali sebesar 0,0589 dengan standar deviasi 0,0070 yang nilai rata-ratanya jauh lebih besar, hal tersebut berarti rentangan datanya rendah dan cenderung homogen. Pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 0,0402 yaitu Kabupaten Bangli dan yang tertinggi terjadi pada Kabupaten Badung dengan nilai sebesar 0,0730. Nilai tersebut memberikan gambaran peningkatan kegiatan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah mengindikasikan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 1.
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Mak	Rata-Rata	SD
desentralisasi fiskal	54	0,0616	0,5971	0,4010	0,0810
akuntabilitas pelaporan keuangan	54	0	1	0,06	0,231

moderasi	54	0,0000	0,5554	0,0290	0,1208
pertumbuhan ekonomi	54	0,0402	0,0730	0,0589	0,0070

Sumber: Hasil data diolah, 2015

Variabel Desentralisasi fiskal yang terendah adalah Kabupaten Bangli sebesar 0,0616 dan tertinggi sebesar 0,5971 pada Kabupaten Badung, dengan rata-rata yang bernilai 0,4010. SD sebesar 0,0810 dimana bernilai jauh lebih kecil dari nilai rata-rata yang berarti rentangan datanya rendah dan cenderung homogen. Desentralisasi fiskal merupakan upaya pemerintah daerah dalam memanfaatkan wewenang yang dimiliki untuk mengintensifkan pemberdayaan daerah. Jika desentralisasi fiskal nilainya semakin besar, maka kontribusi pemerintah daerah tersebut pada pembangunan di daerahnya semakin besar.

Variabel akuntabilitas pelaporan keuangan yang diukur dengan opini audit yang dikeluarkan oleh BPK setiap tahunnya untuk LKPD masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali menunjukkan nilai rata-rata 0,06, nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa masih sangat rendahnya kabupaten/kota di Provinsi Bali yang mendapatkan opini *WTP/unqualified opinion* yang dilihat dari data hanya 3 amatan atau 5,56 persen yang mendapatkan opini *WTP/unqualified opinion* dari 54 amatan hal ini mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bali masih tergolong rendah. Standar deviasi 0,231 yang melebihi rata-rata 0,06 yang berarti rentangan datanya tinggi atau tidak seimbang.

Variabel interaksi desentralisasi fiskal dengan akuntabilitas pelaporan keuangan mempunyai nilai rata-rata 0,0290. Standar deviasi variabel interaksi desentralisasi fiskal dengan akuntabilitas pelaporan keuangan sebesar 0,1208.

Nilai standar deviasi tersebut mempunyai arti jika nilainya lebih besar dari rata-rata berarti rentangan datanya tinggi atau tidak seimbang.

Hasil Uji Analisis Statistik

Model analisis regresi yang dipakai yaitu *Moderate Regression Analysis* (MRA) dengan memakai bantuan program SPSS, hasilnya seperti ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Analisis Regresi Moderasi

Model	Beta	t	Sig.
(<i>constant</i>)	0,04	9,43	0,00
desentralisasi fiskal	0,04	3,81	0,00
akuntabilitas pelaporan keuangan	0,02	0,32	0,75
moderasi	-0,02	-0,25	0,81

Sumber: Hasil data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel2, maka dapat diinterpretasikan:

- 1) Konstanta sebesar 0,04 berarti bahwa apabila variabel desentralisasi fiskal, akuntabilitas pelaporan keuangan, dan interaksi antara desentralisasi fiskal dengan akuntabilitas pelaporan keuangan konstan, maka pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 0,04. Apabila variabel desentralisasi fiskal, akuntabilitas pelaporan keuangan, dan interaksi antara desentralisasi fiskal dengan akuntabilitas pelaporan keuangan bernilai nol, maka pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat sebesar nilai konstanta.
- 2) Koefisien desentralisasi fiskal sebesar 0,04 berarti bahwa apabila variabel desentralisasi fiskal terjadi peningkatan sebesar satu satuan (dengan

asumsi variabel lain konstan), maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi peningkatan sebesar 0,04.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis memperlihatkan nilai (Sig. t) 0,00 lebih kecil dari Los 0,05 ($\alpha=5\%$) dan mempunyai tanda positif pada beta artinya variabel pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara positif oleh variabel desentralisasi fiskal, sehingga hipotesis diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi variabel desentralisasi fiskal sudah dapat memberi dampak positif pada variabel pertumbuhan ekonomi daerah khususnya untuk kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengujian hipotesis interaksi akuntabilitas pelaporan keuangan pada pengaruh desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi pada Tabel 5.2 diperoleh nilai (Sig. t) 0,81 lebih besar dari *level of significance* (Los) 0,05 ($\alpha=5\%$), dan hipotesis ditolak. Hal tersebut berarti akuntabilitas pelaporan keuangan tidak memoderasi pengaruh variabel desentralisasi fiskal pada variabel pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada khususnya.

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Uji kelayakan model dilakukan untuk memperlihatkan semua variabel apakah digunakan dalam model berpengaruh secara simultan pada variabel pertumbuhan ekonomi atau model layak digunakan. Hasil uji F dengan tingkat signifikansi 0,05 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3 memperlihatkan nilai *Ftest* sebesar 6,998 dengan nilai signifikansi 0,01 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut memberi penjelasan bahwa untuk variabel akuntabilitas pelaporan keuangan, desentralisasi fiskal, dan interaksi desentralisasi fiskal dengan

akuntabilitas pelaporan keuangan secara simultan berpengaruh pada variabel pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.
Hasil Uji Kelayakan Model

ANOVA(b)						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,001	3	0,000	6,998	0,001
	Residual	0,002	50	0,000		
	Total	0,003	53			

Sumber : Hasil data diolah, 2015

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya dipakai dalam mengukur model dalam kemampuannya untuk menjelaskan semua variabel terikat. Jika nilai R^2 mendekati satu (1) menunjukkan kemampuan seluruh variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang diperlukan dalam memprediksi semua variabel terikat. Dengan mendasarkan pada hasil uji regresi dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,253 (Tabel 4), sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel desentralisasi fiskal, akuntabilitas pelaporan keuangan, dan interaksi desentralisasi fiskal dengan akuntabilitas pelaporan keuangan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi sebesar 25,3 persen. Sisanya sebesar 74,7 persen variabel pertumbuhan ekonomi ada faktor lain yang mempengaruhinya yang tidak diteliti oleh peneliti.

Tabel 4.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,544	0,296	0,253	0,0060298

Sumber : Hasil data diolah, 2015

Pembahasan Hasil

Dengan mendasarkan pada uji hipotesis yang telah dilaksanakan, diperoleh bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara positif oleh variabel desentralisasi fiskal. Variabel akuntabilitas pelaporan keuangan yang digunakan sebagai pemoderasi menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pelaporan keuangan memoderasi pengaruh variabel desentralisasi fiskal pada variabel pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya desentralisasi fiskal adalah kewenangan yang dilimpahkan untuk daerah dalam membuat kebijakan terkait pemberian pelayanan, meningkatkan partisipasi, serta pemberdayaan dan prakarsa masyarakat. Penyelenggaraan desentralisasi fiskal daerah secara umum periode tahun 2007 sampai dengan 2012 sudah memberikan dampak signifikan dalam peningkatan perekonomian. Hal ini menunjukkan desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam bidang keuangan untuk mengelola potensi-potensi ekonomi yang dimiliki secara optimal sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.

Menurut Elmi (2005) desentralisasi fiskal adalah kewenangan yang dilimpahkan pada bidang penerimaan keuangan yang sebelumnya terpusat baik secara pemanfaatan ataupun administrasinya. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal salah satunya merupakan mekanisme transfer dana dari APBN agar ketahanan

fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dapat terwujud serta dapat memberi stimulus pada masyarakat dalam aktifitas perekonomiannya. Besarnya suatu pendapatan daerah dapat memberikan ruang yang cukup untuk pemerintah dalam membiayai kebutuhan masyarakatnya. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu alat yang dipakai pemerintah dalam pembangunan untuk pengelolaannya dalam hal mendorong daerah maupun nasional dalam perekonomiannya. Melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik diharapkan dapat mewujudkan berbagai kemudahan di dalam melaksanakan pembangunan daerah, sehingga tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Oates (1972) dalam Wibowo (2008) memberikan penegasan bahwa ekonomi dalam peningkatan kemajuannya adalah *outcome* dari preferensi masyarakat yang sesuai dengan pemerintahan di daerah yang terwujud karena pemerintah daerah dalam perannya pada otonomi di daerah yang semakin penting. Desain desentralisasi fiskal menyebabkan esensi otonomi pengelolaan fiskal daerah menitikberatkannya pada *diskresi* (kebebasan) dalam membelanjakan dananya yang sesuai prioritas dan keperluan masing-masing daerah. Sebagian besar untuk tetap pemerintah pusat yang menguasainya penerimaan negara yang bertujuan untuk menjaga bangsa dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh. Penelitian ini mendapatkan hasil yang sejalan dengan penelitian Iimi Atsushi (2005) bahwa pada tahun 1990-an akhir, desentralisasi fiskal adalah suatu instrumen dari pertumbuhan ekonomi, sehingga pada pertumbuhan ekonomi perkapita desentralisasi fiskal mempunyai dampak yang positif. Penelitian ini juga mendapatkan hasil yang sejalan dengan

penelitian Fadjar dan Sembiring (2007) yang menyatakan bahwa dalam hubungannya pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia desentralisasi fiskal dan faktor *endowment* mempunyai pengaruh positif dan signifikan.

Variabel akuntabilitas pelaporan keuangan tidak mampu secara signifikan memperkuat pengaruh desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi, justifikasi yang dapat diberikan adalah BPK dalam proses auditnya mempunyai fungsi untuk memberi kepastian tidak terdapat kewenangan yang disalahgunakan dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Tujuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan pada keuangan adalah memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa penyajian laporan keuangan sudah secara wajar dilakukan dalam segala hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintah (SAP) (Fontanella dan Rossieta, 2014). Temuan BPK RI merupakan temuan yang ditemukan pada saat audit LKPD, temuan ini tidak memperhatikan apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai tetapi hanya memperhatikan ketidaksesuaian kegiatan tersebut dengan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya pengungkapan pada administrasi yang menyimpang, perikatan perdata yang dilanggar, ataupun berbagai hal yang menyimpang yang di dalamnya terkandung unsur pidana (BPK, 2011). Selain itu, penelitian yang mempunyai tahun amatan 2007 sampai dengan tahun 2012 untuk variabel akuntabilitas pelaporan keuangan pada opini yang dikeluarkan BPK setiap tahunnya untuk 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali terdapat masih banyaknya daerah yang

mendapatkan opini selain WTP yaitu dari 54 amatan hanya 3 amatan yang mendapatkan opini WTP atau hanya sebanyak 5,56 persen sisanya kebanyakan daerah masih mendapatkan opini non WTP yang didominasi oleh opini WDP yaitu opini Wajar Dengan Pengecualian yang berarti bahwa penyajian dan pengungkapan laporan keuangan telah dilakukan secara wajar dalam segala hal yang material, namun terdapat hal-hal tertentu yang dikecualikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Dengan mendasarkan pada hasil serta pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan, antara lain:

- 1) Hasil analisis desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali, yang dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, berarti upaya meningkatkan peran pemerintah daerah dalam proses pembangunan di daerahnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, dan total pengeluaran daerah bagi pembangunan di daerahnya sudah berjalan secara efektif dalam memberi suatu stimulus bagi pertumbuhan ekonomi.
- 2) Hasil analisis desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi dengan akuntabilitas pelaporan keuangan sebagai pemoderasi pada Provinsi Bali untuk pemerintah daerah kabupaten/kota, yang dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan yang diprosikan dari opini yang diberikan BPK untuk

LKPD setiap tahunnya tidak memoderasi pengaruh desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi.

Saran yang perlu disampaikan dari penelitian ini untuk hasilnya tersebut, adalah antara lain:

- 1) Pemerintah Daerah dalam upayanya agar pertumbuhan ekonomi di daerahnya semakin meningkat, maka dalam konteks desentralisasi fiskal seharusnya agar lebih ditingkatkan secara optimal serta memberikan kewenangan dalam pengaturan belanjanya agar sesuai dengan aspirasi masyarakat yang lebih luas yang diseimbangkan dengan memberikan suatu kewenangan kepada pemerintah daerah melalui upaya-upaya optimalisasi pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut.
- 2) Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan instrumen kuesioner, pengamatan langsung ke pemerintah daerah atau wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk hasil yang lebih akurat, dan menambah waktu/periode serta luas wilayah penelitian.

REFERENSI

Akai, Nobuo Yukihiro Nishimura and Masayo Sakata. 2007. Complementarity Fiscal Decentralization and Economic Growth, *Economics of Governance, Heidelberg*. Vol 8: Hal. 339

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Panduan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

Bahl, Roy W. and Johannes Linn. 1992. *Urban Public Finance in Developing Countries*. New York: Oxford University Press.

- Baskaran, Thushyanthan and Feld, P Lars.2009. Fiscal Decentralization and Economic Growth in OECD Countries: Is there a Relationship?,*Cesifo Working Paper*. No. 2721 Category 1
- BPK.2008. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007*.Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia.
- BPK.2009. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2008*.Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia.
- BPK.2010. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2009*.Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia.
- BPK.2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010*.Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia.
- BPK.2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011*.Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia.
- BPK.2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012*.Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia.
- BPS Provinsi Bali. 2014. *Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2008-2013*. Denpasar.
- Breuss, Fritz and Eller Markus. 2004. Fiscal Decentralisation and Economic Growth: Is There Really a Link?,*CESifo DICE Report, Journal for Institutional Comparisons*. Vol 2: No.1
- Bird, R. M. and Wallich C.. 1993. Fiscal Decentralization and Intergovernmental Relations in Transition Economics: Toward a Systematic Framework of Analysis,*Country Economics Departement Working Paper, World Bank, Washington D.C.*
- Bird, R.M.. 1993. Threading the Fiscal Labyrinth: Some Issues in Fiscal Decentralization, *National Tax Journal XLVI*. Vol 2: Hal. 202-207
- Biro Keuangan Provinsi Bali.2014. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2012*.Denpasar.

- Cahyono, Budi dan Heri Darwanto. 2002. Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah, *Majalah PP*. Edisi 28 Tahun 2002
- Carnegie and West. 2005. Making Accounting Accountable in the Public Sector, *Critical Perspective on Accounting*. Vol.16: Hal. 905-928
- Davoodi, Hamid dan Zou Heng-fu. 1998. Fiscal Decentralization and Economic Growth: a Cross-Country Study, *Journal of Urban Economics*. Vol. 43: Hal. 244-257
- Desai, R. M., Freinkman L.M., and Goldbrg I. 2003. Fiscal Federalism and Regional Growth Evedience from Russion Federation in the 1990s. *World Bank Policy Research Working Paper 3138*, World Bank, Washington D.C.
- Elmi, Bachrul. 2005. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Epstein, M. J., and Birchard B. 1999. Counting What Counts: Turning Corporate Accountability to Competitive Advantage, *Reading MA: Perseus Books*
- Glasson, John. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hanu, L. 2006. *Perspektif Teori Kontijensi Dalam Sistem Akuntansi Manajemen Dan Sistem Pengendalian Manajemen*. Penerbit Universitas Dharmawangsa.
- Heriningsih, Suchyo dan Marita. 2013. Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa, *Buletin Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"*. Vol. 11: No.1, hal.1-86
- Hidayat, Syarif, 2005. *Too Much Too Soon; Local States Elite's Perspective on The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Jogiyanto. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPF.
- Kapucu, Naim. 2009. *New Public Management and Governance Perspectives in Understanding Public Management*. Public Administration Review.
- Kearns, Kevin P. 1996. *Managing for Accountability, Preserving the Public Trust in Public and Nonprofit Organizations*.
- Khusaini, Mohammad, 2006. *Ekonomi Publik-Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPF Unibraw.

- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Lane, J.E. 2000. *New Public Management*. Routledge. London.
- Litvack, Jennie. 1999. *Decentralization*. Washington D.C..World Bank.
- Liu, Chih hung. 2007. *What Type of Fiscal Decentralization System has better Performance*. School of Public Policy.
- Mansfield, H. 1982. *Accountability and Congressional Oversight*. Washington D.C.: Brooking Institution.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andy Offset.
- Mardiasmo. 2009. “*Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi: 2005-2008*” dalam Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andie, *Era Baru Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Mawhood, P. 1987. *Local Government in The Third World: The Experience of Tropical Africa*. Chicester: Jhon Wiley & Sons.
- Mohammad, Ismail, Rasul Sjahrudin, dan Umar Haryono. 2004. *Akuntabilitas, Konsep dan Pengukuran*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Otley, D. 1980. The Contingency Theory of Management Accounting: Achievements and Prognosis, *Accounting, Organization and Society*. Vol. 5: No. 3, hal. 413-428
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Rahmawati, Farida. “*Desentralisasi Fiskal, Konsep, Hambatan, dan Prospek*” dalam Yustika, Ahmad Erani, 2008, *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia (kajian Teoritis dan Realitis empiris)*. Malang: Banyumedia.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Salleh Sirajjudin H. and Aslam Iqbal. 1995. *Accountability; The Endless Prophecy, Kuala Lumpur, The Asian pasific Development Centre.* Hal. 5
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business.* Jakarta: Salemba Empat.
- Sibero, A. 1985. Peningkatan Kemampuan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, *Prisma*. No. 12
- Sukardi. 2002. Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Kinerja Manajerial: Peran Motivasi Kerja dan Kultur Organisasional sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Badan Usaha Koperasi di Jawa Tengah). *Thesis.* Semarang: Universitas Diponegoro
- Swasono, Fauziah. 2007. Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Indonesia, *Economic and Finance in Indonesia.* Vol. 55 (2)
- Thiessen, Ulrich. 2003. Fiscal Decentralization and Economic Growth in High Income OECD Countries, *Fiscal Studies,* Vol. 24: No. 3
- Vazquez, M Jorge and McNab M Robert. 2001. Fiscal Desentralization and Economic Growth, *Working Paper #01-1, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University*
- Wibowo, Puji. 2008. Mencermati Dampak Desentralisasi Fiscal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, *Jurnal Keuangan Public.* Vol. 5: No. 1
- Woller, Gary M. and Phillips, Kerk. 1998. Fiscal Decentralisation and LDC Economic Growth; An Empirical Investigation. *The Journal of Development Studies.* Vol. 34(4)
- Xie, D., H. Zou, and H. Davoodi. 1999. In Fiscal Decentralization and Economics Growth the United States, *Journal of Urban Economic.* Vol.45: Hal. 228-239
- Zhang, T and Zou. 1998. Fiscal Decentralization, Public spending, and Economics Growth in China, *Journal of Public Economics.* Vol. 67: Hal. 221-240